

HASIL PENGAWASAN PEMILU

I. Data Pengawas Pemilu :

1) Tahapan yang diawasi : Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Provinsi

II. Kegiatan Pengawasan :

a. Bentuk : Pengawasan Langsung
b. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Rekapitulasi DPHP-2 Tingkat Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
c. Sasaran : KPU Prov. Sulawesi Tengah
d. Waktu dan Tempat : Rabu, 14 November 2018, Ruang Rapat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Parman Palu

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada Hari Rabu, 14 November 2018 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rekapitulasi DPTHP-2 tingkat Provinsi, beberapa catatan hasil pengawasan serta saran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman berdasarkan rekapitulasi dan berita acara Penetapan DPTHP-2 di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 66.290 (enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) di 10 (Sepuluh) Kabupaten selain Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yang terdampak langsung bencana alam. Bawaslu Provinsi mengingatkan bahwa data tersebut adalah potensial menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik.

NO	KABUPATEN/KOTA	DPTHP2 (Lak-Laki)	DPTHP2 (Perempuan)	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL BELUM PEREKAMAN
1	PALU	106.135	109.532	215.667	-
2	SIGI	80.698	77.653	158.351	-

3	DONGGALA	101.836	96.875	198.711	-
4	BANGGAI			0	22.411
5	POSO			0	14.782
6	MOROWALI			0	1.076
7	BUOL	45.243	43.308	88.551	7.000
8	BANGGAI LAUT	21.452	21.460	42.912	2.748
9	MOROWALI UTARA			0	2.333
10	BANGGAI KEPULAUAN	37.084	36.747	73.831	6.758
11	TOJO UNA-UNA	58.737	55.694	114.431	168
12	TOLITOLI	74.262	71.130	145.392	5.315
13	PARIGI MOUTONG	152.915	146.421	299.336	3.699
JUMLAH		678.362	658.820	1.337.182	66.290

2. Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi menemukan penggunaan SIDALIH mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu Provinsi menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH, Penetapan DPTHP2 di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali ditetapkan berdasarkan data manual (Non SIDALIH).
3. Berdasarkan data yang dihimpun masih terdapat penundaan Rekapitulasi DPTHP-2 di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menilai proses penyempurnaan DPTHP-1 belum secara penuh terlaksana.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yakni proses penyempurnaan DPTHP-1 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melindung Hak Konstitusional setiap Warga Negara serta untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi **UNTUK MELAKUKAN PENUNDAAN PENETAPAN REKAPITULASI DPTHP-2**

**TINGKAT PROVINSI HINGGA SELURUH KENDALA YANG
DIHADAPU DISELESAIKAN.**

Palu, 14 November 2018

Bawaslu Sulteng